

Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film “*The Act of Killing*”

Patricia Evangeline Setiawan, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra
Surabaya

patricia.evangeline@yahoo.com

Abstrak

Film “*The Act of Killing*” membawa gaya dan pandangan baru yang membahas persoalan tragedi 1965 dengan mengambil sudut pandang algojo 1965. Film ini menampilkan kesaksian langsung dari para pelaku pembunuhan dan penyiksaan orang-orang komunis pada 1965-1966 dengan berbagai rekonstruksi, wawancara dan juga adegan yang mengikuti kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana representasi banalitas kejahatan dalam film “*The Act of Killing*”. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang dipakai adalah semiotika khususnya kode-kode televisi John Fiske. Penelitian ini menggunakan teori milik Hannah Arendt (1963) mengenai banalitas kejahatan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa representasi banalitas kejahatan melalui penggambaran tokoh yang diangkat dalam film ini memiliki karakteristik, seperti semua kategori tidak dipikirkan, tidak mampu berpikir secara mandiri, kepatuhan pada otoritas dan memercayai kejahatan sebagai tindakan kepahlawanan. Gambaran karakteristik ini menonjol pada sosok algojo 1965, yaitu Anwar Congo dan Adi Zulkadry serta tokoh lainnya melalui kode tingkah laku dalam level realitas, kode dialog dan aksi dalam level representasi dan film ini membawa ideologi di mana sebuah kekuasaan bersandar pada *performance* para pelaku kejahatan yang memanfaatkan logika impunitas total.

Kata Kunci: Representasi, Semiotika, Banalitas Kejahatan, Film

Pendahuluan

Tahun 2012 menjadi tahun lahirnya sebuah film dokumenter yang menghebohkan penggemar film di seluruh dunia. Film ini berjudul “*The Act of Killing*” atau “Jagal” dalam bahasa Indonesia yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer seorang sutradara asal Amerika. Kehebohan timbul karena film ini bersifat kontroversial dengan membawa sebuah gaya dan pandangan baru dalam film serupa yang membahas persoalan tragedi 1965. Tragedi ini merupakan peristiwa berdarah mengenai pembunuhan besar-besaran terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Sejak tahun 1998, berbagai diskursus mengenai tragedi ini mulai muncul dan berkembang (*Bentara Putar Film Meneropong Tragedi 1965*, 2013, para 1).

Jika dilihat dari sisi sejarah tahun 1965-1966, film “*The Act of Killing*” sangat jauh berbeda dengan film-film propaganda Orde baru yang berusaha memberikan

pemahaman mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965-1966 yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang-orang untuk menganut suatu aliran, sikap dan tindakan tertentu. Film yang menceritakan mengenai kekejaman komunis yang penuh dengan adegan kekerasan ini berhasil membentuk pandangan mengenai bangkitnya komunisme sebagai ancaman paling berbahaya untuk Indonesia (1985). Film ini hanya menyajikan kisah kejahatan, pengkhianatan dan pemberontakan yang dilakukan oleh komunis sehingga menutupi fakta kejahatan atas kemanusiaan mengenai pembantaian terhadap PKI yang juga terjadi pada tahun 1965-1966. Hal ini menyebabkan berbagai film pasca Orde Baru berusaha membongkar kejahatan itu, inilah yang dilakukan oleh film *“The Act of Killing”* yang menampilkan secara terbuka mengenai pembantaian terhadap komunis yang terjadi pada tahun 1965-1966 (Kurniawan, 2013, p. 147, 160, 161).

Sebagai seni, film ini membangkitkan wawasan mendalam pada sifat banal kejahatan manusia yang dampaknya bisa bergerak jauh melampaui Indonesia dan memberikan kontribusi untuk seluruh umat manusia (Amirullah, 2013, para 5). Selain dari sisi seni, film ini mampu menarik perhatian politik dan membuka berbagai diskusi seputar sejarah dan politik Indonesia di dalam maupun luar negeri. Contohnya saja di Hollywood, film ini menjadi bahan diskusi dan MCN sebagai situs pemeringkat film bergengsi menobatkan film ini dalam peringkat ke lima film terbaik sepanjang 2013 (*The Act of Killing* masuk nominasi Oscar dan BAFTA, 2014, para 8). Hal ini diawali dari pemutaran film pertama kali di festival-festival film *independent* seperti Festival Film Telluride di Amerika Serikat pada Agustus 2012 yang dilanjutkan secara berturut-turut di Festival Film Internasional Toronto dan Festival Internasional Film Dokumenter Copenhagen di Denmark.

Film yang ceritanya didasarkan atas pengakuan algojo 1965 ini sarat akan pesan dan makna kejahatan yang sudah dianggap wajar bahkan dianggap sebagai suatu tindak heroik untuk membela negara yang patut dibanggakan. Hal ini seperti apa yang dianalisis oleh seorang penulis, akademisi dan aktivitis bernama Soe Tjen Marching. Ia melihat bahwa film ini sangat dekat kaitannya dengan teori yang dikeluarkan oleh seorang filsuf Jerman Hannah Arendt mengenai *“The Banality of Evil”* atau disebut banalitas kejahatan sebagai situasi ketidakhadiran pemikiran seseorang yang dapat membuat kejahatan menjadi banal (kasar dan biasa sekali). Sedangkan David Wilson sebagai salah satu pendiri True/False Film Festival juga melihat pandangan Hannah Arendt ini dalam film *“The Act of Killing”*. Ia berpendapat bahwa film ini menyajikan “kejahatan riang” melalui pembunuhnya. Film ini memberikan makna yang berbeda pada sebuah kejahatan (Marching, 2013, Juli).

Dalam film ini perbuatan yang sadis dan mengerikan bisa menjelma menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan sang pelaku tidak mampu menyadari betapa mengerikan dan kejamnya perbuatan yang ia lakukan. Karena itu, dari ketidaksadaran yang timbul maka sang pelaku dapat melakukan tindak kejahatan seperti apa pun tanpa sungguh-sungguh mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Hal ini juga yang mempermudah para pelaku untuk memercayai bahwa tindakan yang ia lakukan adalah sebuah kepahlawanan (Marching, 2013, para 3).

Dalam film-film lain bertemakan tragedi 1965, kejahatan dilihat sebagai bentuk kejahatan yang merugikan dan menghancurkan para korban. Namun, *“The Act of Killing”* membawa kejahatan itu sebagai sesuatu yang wajar walaupun kejahatan itu sendiri dipenuhi dengan beragam kekerasan yang meniadakan hak asasi manusia. Bahkan juri dari PUMA Impact Award 2013 menilai film ini dapat membangkitkan wawasan mendalam pada sifat banal kejahatan manusia. Hal ini membuat kajian mengenai banalitas kejahatan menjadi hal yang menarik. Karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana film *“The Act of Killing”* merepresentasikan banalitas kejahatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode semiotika. Hal ini disebabkan film bukanlah refleksi dari realitas melainkan representasi dari realitas di mana film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi dari kebudayaan dengan menggunakan tanda (Sobur, 2013, p. 128). Selain itu, representasi menjadi penting karena penggambaran media dapat memperkuat maupun mengubah pola-pola sosial yang sedang muncul di masyarakat (Arismunandar, 2011, Oktober).

Peneliti ingin melihat bagaimana gagasan mengenai banalitas kejahatan digambarkan dalam film ini, apa sesuai dengan realitas yang ada atau memiliki kecenderungan lain yang memperbaiki atau memperburuk gagasan itu sendiri. Topik ini menjadi penting karena film *“The Act of Killing”* bukan hanya menceritakan apa yang terjadi di masa lalu melainkan memberitahu Indonesia di masa sekarang yang sarat akan berbagai tindak kejahatan yang bersifat banal atau wajar karena memiliki berbagai sejarah kelam yang dampaknya begitu mengakar sehingga membentuk watak Indonesia masa kini (Kurniawan, 2013, p. 155). Pemahaman terhadap pembunuhan massal 1965-1966 ini dapat menjelaskan berbagai konflik komunal, tawuran, konflik berbasis ekonomi-politik, kultural, keagamaan dan berbagai hal lainnya di masa sekarang (Kurniawan, 2013, p.87).

Tinjauan Pustaka

Banalitas Kejahatan

Gagasan mengenai banalitas kejahatan lahir dari seorang filsuf Jerman bernama Hannah Arendt. Ia mengartikan banalitas kejahatan sebagai situasi ketidakberpikiran seseorang. Gagasan ini bermula ketika ia meliput sidang Adolf Eichmann mulai dari 11 April – 14 Agustus 1961 di Yerusalem. Adolf Eichmann adalah seorang tentara Nazi yang mempunyai tugas utama untuk mengatur transportasi jutaan orang Yahudi dari seluruh Eropa ke dalam kamp-kamp konsentrasi buatan Nazi selama perang dunia kedua (1939-1945). Ia melakukan tugasnya dengan sangat baik dan setelah perang dunia kedua usai, ia pergi ke Argentina dan hidup sebagai orang biasa dengan identitas palsu. Namun, pada 11 Mei 1960, anggota intel Israel menangkap Eichmann dan membuat sidang publik yang bersifat terbuka pada saat Eichmann sampai ke Israel. Tujuan dari sidang ini untuk mencari keadilan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Eichmann selama perang dunia kedua dan menegaskan kepada dunia betapa besar

skala kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang Yahudi pada masa itu (Wattimena, 2011, December).

Saat Arendt bertemu dengan Eichmann, ia merasa kaget karena Eichmann tidak terlihat kejam sama sekali padahal ia adalah pelaku kejahatan kejam pada masa perang dunia kedua. Arendt melihat bahwa orang-orang biasa dengan wajah dan pikiran yang lurus mampu melakukan kejahatan kejam terhadap manusia lain tanpa merasa bersalah ataupun benci. Hal inilah yang ia lihat dalam sosok Eichmann selama proses persidangan bahkan pada saat Eichmann menjawab dengan pernyataan-pernyataan baik yang normatif. Publikasi hasil laporan terhadap sidang tersebut diterbitkan tahun 1963 dengan judul "*Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality of Evil*". Laporan ini memuat pandangan Arendt yang menekankan pada banalitas kejahatan (Wattimena, 2011, December).

Pandangan Arendt diperkuat dengan gambarannya mengenai Eichmann. Ia melihat Eichmann sebagai seorang perwira militer yang patuh namun Eichmann tidak sadar tentang akibat dari tindakan patuhnya. Eichmann bukanlah orang bodoh yang jahat, berwajah kejam dan berbadan besar tetapi ia adalah orang biasa yang cerdas dan patuh. Namun yang kurang dari orang-orang seperti Eichmann adalah ketidakberpikiran. Mereka tidak menggunakan kecerdasannya untuk berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Ketidakberpikiran bisa menjadi sumber kejahatan bahkan Arendt mengatakan bahwa ketidakberpikiran dapat jauh lebih merusak dari insting jahat sekalipun dan ini bisa ada dalam diri manusia (Wattimena, 2011, December).

Kejahatan didasarkan pada kebaikan sehingga sebuah kejahatan dapat dikatakan merupakan kejahatan jika bukan merupakan kebaikan. Kejahatan juga didasarkan pada penilaian terhadap sesuatu. Kejahatan muncul dari ketidakhadiran pemikiran yang memungkinkan kejahatan menjadi banal. Ketika seseorang tidak berpikir maka kejahatan selalu dimungkinkan dan dapat berkembang. Karena itu, pemikiran dapat memungkinkan seseorang untuk terhindar dari kejahatan (Liere, 2010, p. 62-71).

Terkait dengan pemikiran, Arendt mengatakan bahwa setiap orang dapat berpikir tetapi tidak semua orang berpikir. Pemikiran adalah dialog intern di mana seseorang dapat mengkategorikan yang baik dan jahat, yang salah dan benar dan juga penderitaan dan sebab penderitaan tetapi saat ketidakhadiran pemikiran akan membuat semua kategori itu tidak dipikirkan lagi sehingga dapat menghasilkan kejahatan banal di mana pelaku tidak lagi berpikir baik dan jahat, salah dan benar, pertanggungjawaban dan hal lainnya. Selain itu, hal ini membuat pendapat pribadi dan pendapat umum yang dominan menjadi tidak jelas sehingga subjek tidak lagi memiliki pendapat individual dan mengikuti massa begitu saja. Arendt juga berpendapat mengenai orang yang tidak berpikir adalah orang yang tidur dan tidak memiliki kewaspadaan (Liere, 2010, p. 62-71).

Pelaku kejahatan ini tidak mampu berpikir secara mandiri. Hal inilah yang dapat membuat para pelaku tertipu dengan mudah untuk memercayai bahwa kejahatan yang ia lakukan adalah sebuah kepahlawanan. Dalam diri pelaku ada kepatuhan

pada sebuah otoritas tanpa berpikir secara mandiri tentang otoritas itu. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Milgram (1963) mengenai kepatuhan otoritas menghasilkan kesimpulan bahwa struktur otoritas yang kuat membuat kepatuhan pada otoritas menjadi kuat. Hal ini yang membuat kebanyakan orang lebih menghormati suara dari otoritas daripada suara korban. Otoritas yang kuat membuat pelaku tidak merasa bertanggungjawab atas kekerasan yang ia lakukan kepada orang lain dan membuat kebanyakan orang bersedia untuk membunuh orang lain (Liere, 2010, p. 62-71).

Metode

Konseptualisasi Penelitian

Representasi

Menurut Eriyanto, dua hal penting yang berkaitan dengan representasi adalah bagaimana seseorang, kelompok atau gagasan ditampilkan sesuai dengan fakta yang ada atau memiliki kecenderungan lain yang hanya menampilkan sisi buruk seseorang atau kelompok tertentu dalam pemberitaan sehingga menimbulkan kesan meminggirkan. Hal ini dilihat dari sisi keterkaitannya dengan realitas yang ada. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana eksekusi penyajian objek di dalam media melalui pemilihan kata, kalimat, aksentuasi dan penguatan foto atau imaji yang dipakai untuk menampilkan seseorang, kelompok atau gagasan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2001, p.113).

Banalitas Kejahatan

Banalitas kejahatan adalah situasi ketidakberpikiran seseorang. Kejahatan muncul dari ketidakhadiran pemikiran yang memungkinkan kejahatan menjadi banal. Ketika seseorang tidak berpikir maka kejahatan selalu dimungkinkan dan dapat berkembang. Karena itu, pemikiran dapat memungkinkan seseorang untuk terhindar dari kejahatan. Pemikiran adalah dialog intern di mana seseorang dapat mengkategorikan yang baik dan jahat, yang salah dan benar dan juga penderitaan dan sebab penderitaan tetapi saat ketidakhadiran pemikiran akan membuat semua kategori itu tidak dipikirkan lagi sehingga dapat menghasilkan kejahatan banal di mana pelaku tidak lagi berpikir baik dan jahat, salah dan benar, pertanggungjawaban dan hal lainnya. Pelaku kejahatan ini tidak mampu berpikir secara mandiri di mana ada ketidaksadaran yang membuatnya mampu melakukan tindakan kejam tetapi tidak mampu mengenali betapa kejam perbuatan yang ia lakukan karena ia tidak sungguh-sungguh mengetahui apa yang ia perbuat. (Liere, 2010, p. 62-71).

Subjek Penelitian

Sasaran penelitian ini mencakup subjek dan objek penelitian. Dalam meneliti “representasi banalitas kejahatan dalam film *“The Act of Killing”*” yang menjadi subjek penelitian adalah film *“The Act of Killing”*, sedangkan objek dari penelitian ini adalah representasi banalitas kejahatan dalam film *“The Act of*

Killing". Unit analisis dalam penelitian ini adalah paradigma dan sintagma yang terdapat dalam film "*The Act of Killing*". Paradigma adalah kumpulan tanda-tanda dan dari kumpulan itulah dipilih satu untuk digunakan sedangkan sintagma adalah paduan dari tanda-tanda yang dipilih.

Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode semiotika milik John Fiske sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis semiotik. Jika berbicara semiotika sama halnya sedang berbicara tentang tanda karena tanda menjadi perhatian utama dalam semiotika yang dipakai untuk menganalisis teks media dengan asumsi tidak ada media yang tidak dikomunikasikan melalui tanda.

Temuan Data, Analisis dan Interpretasi

Peneliti menemukan bahwa dalam film "*The Act of Killing*" menggambarkan banalitas kejahatan. Konstruksi banalitas kejahatan dalam film ini merujuk pada berbagai aspek yang ada dalam banalitas kejahatan seperti tidak mampu berpikir secara mandiri, memercayai kejahatan sebagai tindakan kepahlawanan, kepatuhan pada otoritas dan semua kategori tidak dipikirkan. Banalitas kejahatan ditunjukkan dalam kode-kode televisi John Fiske yang dilihat dalam tiga level, yaitu level realitas, level representasi dan level ideologi yang dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang ada di atas.

Aspek semua kategori tidak dipikirkan adalah aspek yang paling banyak terlihat dalam berbagai *scene*. Terkait dengan pemikiran, Arendt (1963) mengatakan bahwa setiap orang dapat berpikir tetapi tidak semua orang berpikir. Hal inilah yang terlihat dalam diri para pelaku kejahatan di mana mereka tidak bisa menggunakan pikirannya secara menyeluruh untuk memikirkan berbagai kategori padahal mereka bukanlah orang yang bodoh ataupun tidak bisa berpikir. Hal ini terbukti dari berbagai kode dialog, tingkah laku bahkan aksi yang didukung berbagai ekspresi yang disampaikan oleh para pemain khususnya Anwar Congo dan Adi Zulkadry sebagai algojo.

Pemikiran adalah dialog intern di mana seseorang dapat mengkategorikan yang baik dan jahat, yang salah dan benar dan juga penderitaan dan sebab penderitaan tetapi saat ketidakhadiran pemikiran akan membuat semua kategori itu tidak dipikirkan lagi sehingga dapat menghasilkan kejahatan banal di mana pelaku tidak lagi berpikir baik dan jahat, salah dan benar, pertanggungjawaban dan hal lainnya (Liere, 2010, p. 62-71). Jadi dapat dikatakan bahwa kejahatan banal yang dilakukan merupakan hasil dari ketidakhadiran pemikiran itu sendiri. Hal yang paling berbahaya datang ketika kejahatan banal itu menjadi sangat nyata yang dilakukan oleh Anwar Congo dan Adi Zulkadry. Namun, efek dari ketidakhadiran pemikiran itu tidak berhenti sampai pada kejahatan banal yang dilakukan melainkan jauh melebihi itu semua di mana para pelaku pembunuhan yang sudah puluhan tahun tidak melakukan kejahatan banal itu masih bisa merasakan efek

dari ketidakhadiran pemikiran atas kejahatan banal yang mereka lakukan. Gambaran ini terlihat dari obsesi Anwar Congo untuk menunjukkan bagaimana dirinya dalam mewujudkan satu contoh cerita yang pernah ia lakukan pada masa mudanya. Dengan obsesinya ini, ia menunjukkan berbagai kesenangan dan kebanggaan pada saat proses pembunuhan yang ia lakukan melalui gerak tubuh, ekspresi dan dialog yang terlihat dalam berbagai *scene*. Salah satunya kode dialog yang ada dalam *scene* 8 yang disampaikan oleh Anwar Congo “...sepertinya menghabisi dengan gembira begitu.” dan berbagai tingkah laku Anwar seperti bernyanyi, bergoyang dan berdansa dengan tertawa pada saat membunuh. Sedangkan kebanggaan yang dirasakan Anwar terlihat dalam kode dialog “...saya tetap bangga karena apa yang dilihat anak-anak itu, saya telah dapat berbuat untuk menumpas, saya telah berbuat dengan lebih lebih lebih dari perbuatan itu sendiri.” dalam *scene* 20.

Selain ketidakhadiran pemikiran atas berbagai kategori, Ketika seseorang tidak berpikir maka kejahatan selalu dimungkinkan dan dapat berkembang. Karena itu, pemikiran dapat memungkinkan seseorang untuk terhindar dari kejahatan. Pelaku kejahatan ini tidak mampu berpikir secara mandiri sehingga membuat pendapat pribadi dan pendapat umum yang dominan menjadi tidak jelas dan subjek tidak lagi memiliki pendapat individual serta mengikuti massa begitu saja (Liere, 2010, p. 62-71). Gambaran ini sangat terlihat pada saat Anwar maupun pelaku lainnya sedang bersama ataupun tergabung dalam suatu kelompok karena kelompoklah yang mempengaruhi bagaimana cara berpikir seseorang apalagi jika orang tersebut tidak mempunyai pikiran mandiri yang bisa ia pertahankan. Hal ini membuat para pelaku dengan mudah dapat mengikuti arus pendapat dominan yang ada tanpa menghiraukan pikirannya sendiri. Arendt juga berpendapat mengenai orang yang tidak berpikir adalah orang yang tidur dan tidak memiliki kewaspadaan.

Ketidakmampuan berpikir secara mandiri juga membuat para pelaku tertipu dengan mudah untuk memercayai bahwa kejahatan yang ia lakukan adalah sebuah kepahlawanan (Liere, 2010, p. 62-71). Hal ini tergambar dalam berbagai *scene* melalui kode dialog, kode tingkah laku dan aksi dari para pelaku kejahatan. Anwar Congo sebagai pelaku kejahatan merasa bangga karena dia sudah menumpas komunis. Dalam hal ini, ia merasa sedang melakukan hal yang benar di mana apa yang ia lakukan adalah untuk kepentingan bersama atas hadirnya komunis yang menjadi musuh bersama. Bahkan Anwar berharap tindakannya ini bisa diingat oleh banyak orang. Kepercayaan Anwar juga terlihat dalam *scene* 56. *Scene* ini menceritakan korban yang sedang berterima kasih atas apa yang Anwar lakukan dengan memberikan medali lalu Anwar menerimanya dengan rasa kemenangan yang terlihat dari gerak tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anwar memercayai tindakannya sebagai tindakan kepahlawanan yang pantas untuk diberi penghargaan. Kebanggaan ini mengindikasikan kepercayaan atas tindakan yang ia lakukan.

Dalam diri pelaku juga ada kepatuhan pada sebuah otoritas tanpa berpikir secara mandiri tentang otoritas itu. Struktur otoritas yang kuat membuat kepatuhan pada otoritas menjadi kuat (Liere, 2010, p. 62-71). Hal ini tergambar melalui tindakan

kejahatan yang Anwar lakukan di mana ia membunuh berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak lain yang mempunyai otoritas lebih kuat dari dia. Hal ini yang membuat kebanyakan orang lebih menghormati suara dari otoritas daripada suara korban. Bahkan Anwar sama sekali tidak mendengarkan ataupun memikirkan penderitaan dan sebab penderitaan dari korban tersebut. Selain itu, akibat yang dirasakan dari otoritas yang kuat membuat pelaku tidak merasa bertanggungjawab atas kekerasan yang ia lakukan kepada orang lain dan membuat kebanyakan orang bersedia untuk membunuh orang lain seperti apa yang disampaikan oleh Anwar dan Adi bahwa yang seharusnya bertanggungjawab bukan mereka karena kematian dari korban merupakan ekses yang harus diterima oleh korban.

Film ini bukan hanya menyajikan berbagai aspek yang menggambarkan banalitas kejahatan dari sisi pelaku, melainkan menjelaskan secara kultural mengenai peristiwa 1965-1966 dalam konsep *jingoisme* dan *vendetta* seperti apa yang dikatakan Hermawan Sulistyono (Sejarawan dan Profesor Riset LIPI). *Jingoisme* adalah situasi konstruk relasi sosial di mana norma dan nilai-nilai lama telah runtuh sedangkan norma dan nilai baru belum terbentuk sehingga siapapun yang memiliki *mighty power* maupun kekuatan fisik akan mampu membangun kekuatan (sosial) atas orang atau pihak lain. Dengan adanya *jingoisme* pada suatu komunitas akan membuka ruang bagi ekspresi kebencian dan dendam melalui tindak kekerasan. Karena itu, konsep *jingoisme* memberikan penjelasan kultural atas jalinan relasi sosial yang penuh kekerasan di mana tetangga saling bunuh, kenalan saling terkam dan kerabat saling curiga (Kurniawan, 2013, p. 87).

Di bawah konteks *jingoisme* terdapat konsep *vendetta* dengan gejala *local parlance* di mana “pilihannya membunuh atau dibunuh”. *Vendetta* dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang mengejar lawan hingga ke rumah-rumah mereka dengan membawa pulang bagian dari tubuh korban seperti kuping atau jari sebagai token atas *mighty power* dalam *jingoisme*. Dengan memahami pembunuhan massal 1965-1966 dapat menjelaskan berbagai konflik komunal, tawuran, konflik berbasis ekonomi-politik, kultural, keagamaan pada masa sekarang. Pendekatan ini penting karena karakter kekerasan bukan hanya terjadi pada peristiwa 1965-1966 saja tetapi terus sampai sekarang melekat hampir di semua komunitas di semua wilayah di Indonesia (Kurniawan, 2013, p. 87). Hal inilah yang coba ditampilkan oleh film “*The Act of Killing*” di mana film ini bukan sekadar mengungkap sebuah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia melainkan menceritakan bagaimana Indonesia di masa sekarang yang sangat dipengaruhi oleh berbagai sejarah di masa lalu. Di balik berbagai aksi dan tingkah laku yang dilakukan oleh para jagal, ada berbagai pernyataan maupun aksi dari sisi lain yang dapat menggambarkan sebuah kesinambungan praktik politik, hukum, dan ekonomi masa kini yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan tergambar melalui kode naratif. Kesinambungan berbagai praktik ini berjalan dengan mulus dan menjadi penyakit kronis yang diidap bangsa sehingga nyaris telah merata menjadi milik dan tanggung jawab nasional (Kurniawan, 2013, p. 148). Berbagai praktik ini merupakan hasil dari sejarah masa lalu yang terus berakar kuat dalam tubuh bangsa ini seperti apa yang dikatakan oleh Ariel Heryanto (*Associate Professor, Australian National University*) bahwa

pembantaian 1965-1966 merupakan faktor terkuat yang ikut membentuk watak kehidupan sosial Indonesia masa kini (Kurniawan, 2013, p. 155). Praktik-praktik ini merujuk pada berbagai normalisasi kejahatan seperti penipuan, fitnah, penyangkalan, pembantaian, pemerkosaan, penjarahan dan berbagai tindak kejahatan lainnya.

Implikasi dari kesinambungan berbagai praktik ini mengarah pada pengertian mesin besar parasit yang tidak hanya menghisap kekayaan negara tetapi secara bersamaan menggerogoti sistem-sistem yang menopang keberadaan bangsa dengan berbagai cara seperti menciptakan aturan-aturan yang melindungi dirinya sendiri, keputusan-keputusan yang melindungi keluarganya sendiri dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menguntungkan konco-konconya sendiri seperti teman, sahabat maupun kaki tangannya. Karakteristik yang dimiliki oleh penguasa besar parasit adalah kemudahan yang ia miliki untuk berlindung di balik berjuta mesin parasit yang diciptakannya sendiri sehingga ia menjadi kebal hukum. Hal ini bisa terjadi karena ia telah mengkontaminasi hukum dengan virus-virus kejahatan dan menanamkan hukum dengan berjuta parasit melalui aparat hukum yang menjelma menjadi parasit-parasit yang menghisap pohon hukum itu sendiri. Dalam bangsa ini hidup *obligate parasite*, parasit yang tidak dapat hidup tanpa kemudahan, fasilitas dan hak-hak istimewa. Karena itu, parasit seperti ini hanya dapat hidup dari menghisap kekayaan negara seperti halnya pengusaha nepotis, pengusaha kroni, pengusaha monopoli, pengusaha mumpungisme, pejabat pengusaha, preman, perampok dan koruptor. Setiap tindakan parasit jahat adalah tindakan kriminalitas karena ia menghisap dan menyedot sesuatu yang bukan miliknya dan menggerogoti sumber daya yang bukan kepunyaannya. Berkembang biaknya mesin-mesin parasit ini akan membentuk sebuah kejahatan total yang menjalari seluruh komponen bangsa tanpa batas. Artinya, semua komponen bangsa dan negara menjelma menjadi parasit, setiap orang menjelma menjadi penjahat dan setiap orang menjelma menjadi kriminal dalam sebuah jaringan parasit yang menggerogoti negara (Piliang, 2003 A, p. 66-68). Dalam film ini menggambarkan bahwa premanisme sudah menjadi kejahatan total karena terlihat gejala-gejala berkembang biaknya kejahatan dari praktik premanisme yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi yang melandaskan dirinya pada Pancasila. Bahkan praktik premanisme ini didukung oleh pihak-pihak yang dapat dikatakan memiliki kekuasaan dan otoritas yang besar, seperti Haji Anif (Pengusaha dan sesepuh Pemuda Pancasila), Marzuki (anggota DPRD Sumatera Utara), Japto Soerjosoemarno (Ketua Umum Pemuda Pancasila), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara) dan Jusuf Kalla (Wakil Presiden Republik Indonesia).

Dengan berbagai aksi keterbukaan dari sebagian besar pembunuh maka dapat menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sedang memamerkan impunitas yang mereka nikmati. Impunitas adalah kebijakan membiarkan atau melindungi pelaku kejahatan dari tanggung jawab dan sanksi kejahatan yang telah dilakukannya. Impunitas ini sendiri adalah warisan dari periode rezim otoritarian di mana pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat dibawa ke pengadilan karena kekuasaan yang mereka miliki untuk menghalangi hukum itu ditegakkan (Tindage & Hutabarat, 2008, p. 138). Inilah yang menjadi salah satu penyebab kuatnya banalitas kejahatan yang mereka lakukan karena ada impunitas yang mereka bisa

nikmati. Hal ini terlihat melalui penjelasan Adi yang menyatakan bahwa ia seperti diizinkan untuk bisa membunuh dan terbukti hal ini tidak membuat ia dihukum melainkan ia bebas dari segala tanggung jawab dan sanksi yang seharusnya menjerat dirinya sebagai seorang pelaku kejahatan.

Film ini memperlihatkan secara jelas bagaimana media mengkonstruksikan sebuah sudut pandang yang mendukung adanya banalitas kejahatan. Pesan ini bukan hanya tergambar pada algojo 1965-1966 melainkan tergambar melalui berbagai sistem yang melekat dalam Indonesia sehingga mengesankan dukungan pada banalitas kejahatan. *“The Act of Killing”* sebagai hasil konstruksi dari Joshua Oppenheimer sebagai sang sutradara secara jelas menggambarkan pemerintah yang mendukung dan setuju akan adanya preman sehingga pemerintah itu sendiri digambarkan menjadi bagian dalam preman yang berarti pemerintah sama dengan preman. Hal ini secara tidak langsung mengonstruksikan citra Indonesia melalui banalitas kejahatan yang dipakai sebagai alat di mana Indonesia digambarkan sebagai negara yang dipenuhi dengan sarang kejahatan yang berakar akibat ulah Indonesia sendiri.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, teks film *“The Act of Killing”* merepresentasikan aspek-aspek banalitas kejahatan seperti pandangan Hannah Arendt. Aspek-aspek tersebut, yaitu aspek tidak mampu berpikir secara mandiri, memercayai kejahatan sebagai tindakan kepahlawanan, kepatuhan pada otoritas dan semua kategori tidak dipikirkan. Berbagai aspek ini terlihat melalui sosok pemeran utama, Anwar Congo dan teman sejawatnya Adi Zulkadry beserta dengan berbagai tokoh pendukung yang terlibat dalam film ini. Gambaran mengenai berbagai aspek banalitas kejahatan digambarkan lebih menonjol pada kode-kode tingkah laku dalam level realitas dan kode aksi serta kode dialog dalam level representasi.

Film ini membawa ideologi di mana sebuah kekuasaan bersandar pada *performance* para pelaku kejahatan yang memanfaatkan logika impunitas total. Di balik berbagai aksi dan tingkah laku yang dilakukan oleh para jagal, ada berbagai pernyataan maupun aksi dari sisi lain yang dapat menggambarkan sebuah kesinambungan praktik politik, hukum, dan ekonomi masa kini yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan tergambar melalui kode naratif. Hal ini tergambar dalam film melalui praktik banalitas kejahatan yang mengarah pada aksi premanisme yang didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas besar. Implikasi dari kesinambungan berbagai praktik ini mengarah pada pengertian mesin besar parasit yang akan membentuk sebuah kejahatan total yang menjalari seluruh komponen bangsa tanpa batas. Mereka bersembunyi di balik seragam identitas kolektif yang memberikan jalan legalitas untuk menjalankan kekuasaan dengan memanfaatkan impunitas total. Karena itu, film *“The Act of Killing”* bukan sekadar mengungkap sebuah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia melainkan menceritakan bagaimana Indonesia di masa sekarang yang sangat dipengaruhi oleh berbagai sejarah di masa lalu.

Daftar Referensi

- Amirullah. (14 November 2013). *Film The Act of Killing diganjar PUMA Impact Award*. Retrieved January 21, 2014 from <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/111529758/p-Film-The-Act-of-Killing-Dapat-Penghargaan>
- Arismunandar, Satrio. (8 Oktober 2011). *Media massa sebagai sumber belajar kejahatan*. Retrieved March 12, 2014 from <http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2011/10/media-massa-sebagai-sumber-belajar.html>
- Bentara Putar Film Meneropong Tragedi 1965. (21 September 2013). Retrieved Februari 24, 2014 from <http://www.bentarabudaya.com/agenda.php?id=1456>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana : pengantar analisis teks media*. Yogyakarta : LkiS.
- Kurniawan, (2013). *Pengakuan Algojo 1965*. Jakarta : PT Tempo Inti Media Tbk.
- Liere, Lucien. (2010). *Memutus rantai kekerasan*. Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.
- Marching, Soe Tjen. (5 Juli 2013). *Coming to Grips With the Banality of Mass Murder in Indonesia's Past*. Retrieved February 24, 2014 from <http://www.thejakartaglobe.com/opinion/coming-to-grips-with-the-banality-of-mass-murder-in-indonesias-past/>
- (21 Juli 2013). *Dalam The Act of Killing, sutradara memberi para jagal panggung yang aneh*. Retrieved February 24, 2014 from <http://www.soetjenmarching.com/id/catatan/91-dalam-the-act-of-killing-sutradara-memberi-para-jagal-panggung-yang-aneh.html>
- Piliang, Yasraf Amir. (2003 A). *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*. Solo : Tiga Serangkai.
- Tindage, Ruddy & Rainy MP Hutabarat. (2008). *Gereja dan Penegakan HAM*. Yogyakarta : Kanisius.
- Wattimena, Reza A.A. (26 Desember 2011). *Hannah Arendt, banalitas kejahatan, dan situasi Indonesia*. Retrieved January 21, 2014 from <http://rumahfilsafat.com/2011/12/26/hannah-arendt-banalitas-kejahatan-dan-situasi-indonesia/>